

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Keberadaan hutan di Indonesia dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan menjelaskan bahwa hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa lahan yang didominasi sumber pepohonan dalam alam persekutuan lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Indonesia salah satu negara dengan hutan yang memiliki 12% spesies mamalia dunia, 7,3% spesies reptile dan ambifi serta 17% spesies burung<sup>1</sup>. Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia.

Kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang terkandung di dalam kawasan hutan perlu dikelola dengan baik agar tidak rusak dan punah, melalui pengelolaan yang bertanggung jawab diantaranya melalui kebijakan penetapan kawasan konservasi.<sup>2</sup> Penetapan kawasan hutan baik daratan maupun perairan untuk konservasi sumber daya alam pada dasarnya merupakan wujud dari kesadaran mengenai urgensi lestariannya fungsi lingkungan bagi kelanjutan kehidupan. Salah satu bentuk kawasan konservasi sumber daya alam yang relatif populer adalah taman nasional. Di Indonesia sebagian besar kawasan konservasi berstatus sebagai taman nasional dengan luas 16.47 juta hektar atau 60,2% dari 27.26 juta hektar total luas kawasan konservasi.

---

<sup>1</sup> Meranti Eka Putri. 2016. “Pengembangan Ekowisata di Taman Nasional Betung Kerihun Dalam Kerangka Heart Of Borneo”. eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2018, 6 (2) 671-682  
ISSN 2477-2623 (online), ISSN 2477-2615

<sup>2</sup> Nanti Kasih. Disertasi: *Konsep Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat Wilayah Kabupaten MusI Rawas Sumatera Selatan*. 2012 Institut Pertanian Bogor

Menariknya pada kawasan hutan termasuk kawasan hutan taman nasional, keberadaannya lekat dengan masyarakat lokal atau adat yang secara turun-temurun telah ada jauh sebelum kawasan dibentuk. Berdasarkan hasil survey kehutanan tahun 2014, terdapat 32.447.851 jiwa yang menetap di 2.037 desa di dalam hutan dan 19.247 desa sekitar hutan.<sup>3</sup> Tingginya nilai dan manfaat hutan bagi masyarakat yang berada di dalam maupun sekitar kawasan hutan, berimplikasi pada ketergantungan akan sumber daya hutan yang menyebabkan potensi ancaman, bahkan kerusakan terhadap kawasan taman nasional.<sup>4</sup>

Hal ini kemudian masih didukung oleh kebijakan pemerintah yang cenderung tidak melibatkan masyarakat dalam segala bentuk pengelolaan suatu kawasan. Kepentingan pemerintah yang memandang taman nasional sebagai tempat perlindungan dan pengawetan flora dan fauna yang hampir punah mewujud dalam bentuk preservasi yang berlebihan, sehingga segala bentuk aktivitas yang berkenaan dalam kawasan ditempatkan sebagai ancaman yang selanjutnya harus dilarang.<sup>5</sup> Dukungan dan partisipasi aktif masyarakat juga akan sulit terwujud jika tidak diimbangi oleh upaya nyata pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Seperti yang terjadi di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW) merupakan kawasan konservasi daratan terluas di Sulawesi dengan luas 282.008,757 hektar yang merupakan kawasan pelestarian alam yang berfungsi lengkap untuk perlindungan sistem

---

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik.2014. Analisis Rumah Tangga Sekitar Kawasan Hutan

<sup>4</sup> Nurrani L. Tabba S. 2013. *Persepsi dan ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam Taman Nasional Akatojawe Lolaobata di Provinsi Maluku Utara*. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan. Vol.10No.1 Maret 2013, Hal 61-73

<sup>5</sup> Totok Dwi Diantoro. *Perambahan Kawasan Hutan pada Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo, Riau*. Mimbar Hukum. Volume 23, Nomor 3, Oktober 2011, Halaman 431 - 645

penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya serta pemanfaatan secara lestari.<sup>6</sup> Sebagai kawasan konservasi TNBNW masih sering dihadapkan dengan berbagai ancaman kerusakan kawasan salah satunya pola ekstensifikasi lahan yang dilakukan oleh masyarakat sehingga menyebabkan deforestasi maupun degradasi. Berdasarkan data inventaris Balai TNBNW, deforestasi yang terjadi di kawasan TNBNW dalam kurun waktu 2000-2015 sebesar 2,2% atau kehilangan tutupan hutan 6.060 hektar, sedangkan degradasi hutan TNBNW tahun 2016 sebesar 5,64% sedikit menurun 1,24% dari tahun 2015 yakni sebesar 6,88%. Degradasi tersebut disebabkan ketergantungan masyarakat akan kawasan TNBNW. Ketergantungan tersebut dapat dilihat dari penggunaan kawasan diluar konservasi seperti area untuk pemukiman dan pertanian maupun perkebunan. Hal ini disebabkan terdapat 125 Desa yang berbatasan langsung dengan kawasan TNBNW yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan kawasan. Tentunya hal ini menjadi potensi ancaman terhadap kerusakan hutan TNBNW.

Kecenderungan pengelolaan kawasan taman nasional yang belum melibatkan masyarakat di dalam maupun sekitar kawasan sering menimbulkan perbedaan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat. pengelolaan kawasan konservasi yang masih mengedepankan pola konservatif, yang memandang kawasan konservasi menjadi sebuah keharusan sehingga pengelolaan kawasan hutan TNBNW masih sebatas mengamankan dari pada memanfaatkan potensi yang ada. Dalam konteks kehutanan berbagai tekanan dan ancaman disebabkan dominasi peran negara dalam mengelolah taman nasional menyebabkan

---

<sup>6</sup> Cristopel Paino.2016. “*Bogani Nani Wartabone yang Bukan Taman Nasional Biasa*” diakses dari <http://www.mongobay.co.id/2016/06/30/bogani-nani-wartabone-yang-bukan-taman-nasional-biasa/> pada tanggal 9 Februari 2019 pukul 10.45

kurangnya keterlibatan masyarakat lokal.<sup>7</sup> Dalam banyak kasus, masyarakat jarang dimunculkan dalam pengelolaan kawasan konservasi.<sup>8</sup> Padahal masyarakat adalah pelaku utama yang dapat menjadi sumberdaya potensial sekaligus ancaman terhadap kelestarian kawasan. Pada saat kawasan konservasi dianggap sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi masyarakat sekitar, maka masyarakat menjadi pendukung dalam upaya pelestarian kawasan konservasi tersebut. Sebaliknya apabila kawasan dianggap sebagai penghalang dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, maka masyarakat sekitar akan menjadi ancaman.

Oleh sebab itu pemerintah dituntut untuk mengubah paradigma pengelolaan taman nasional yang cenderung konservatif, yang terpisah dari wilayah sekeliling, kearah pengelolaan multipihak salah satunya dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut terlibat dalam mengelola kawasan taman nasional sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam berserta perubahannya.<sup>9</sup> Aturan ini diperkuat lagi dengan adanya Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Keterlibatan

---

<sup>7</sup> Lily Sri Ulina Peranginangin. *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi*. Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik JKAP Vol 18 No 1- Mei 2014

<sup>8</sup> Ristianasari, dkk. 2013. *Dampak Program Pemberdayaan Model Desa Konservasi terhadap Kemandirian Masyarakat: Kasus di Taman Nasional Bukit Barisan Selata Lampung*. Jurnal Penelitian Sosial & Ekonomi Kehutanan Vol.10 No.3 September 2013, Hal 173-185

<sup>9</sup> Peraturan Menteri LHK Nomor: P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perubahan atas P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

masyarakat ini juga sebagai langkah 10 cara baru pengelolaan kawasan konservasi yang menempatkan masyarakat sebagai subjek dari pengelolaan kawasan.

Dalam mewujudkan kemitraan konservasi, pemerintah melalui Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Balai TNBNW melakukan kerjasama kemitraan dengan sejumlah desa penyangga melalui kelompok masyarakat yang tinggal di dalam maupun sekitar kawasan TNBNW. Kerjasama ini bertujuan untuk menguatkan fungsi dan memanfaatkan potensi dari TNBNW itu sendiri sesuai Undang-Undang No 5 Tahun 1990 dimana Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli dikelola dengan sistem yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Keindahan alam serta flora dan fauna yang ada di dalam kawasan TNBNW dapat dimanfaatkan melalui sektor pariwisata.

Salah satu kelompok masyarakat desa penyangga yang menjadi mitra Balai TNBNW sejak 2017 di kawasan penyangga adalah Kelompok Ekowisata Maleo yang merupakan representatif dari Desa Tulabolo yang berada di Kabupaten Bone Bolango melalui pemanfaatan objek wisata alam dengan konsep ekowisata. Hal yang melatarbelakangi Desa Tulabolo dipilih menjadi mitra Balai TNBNW dalam mengembangkan ekowisata yakni terdapat potensi flora dan fauna endemik Sulawesi yakni habitat burung maleo serta adanya aktivitas kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Sehingga dengan adanya kelompok Ekowisata Maleo ini dapat menjadi role model kemitraan Balai TNBNW dengan kelompok masyarakat, sebagai representatif Desa penyangga.

Ekowisata adalah salah satu bentuk pemanfaatan jasa lingkungan hutan yang secara ekonomi menguntungkan, secara ekologi ramah lingkungan, secara teknis dapat diterapkan, dan secara sosial dapat diterima oleh masyarakat.<sup>10</sup> Menurut *The Ecotourism Society* tahun 1990, definisi ekowisata adalah perjalanan pariwisata seseorang yang dilakukan ke dalam area yang masih alami dengan tujuan mengkonservasi, melestarikan dan juga mensejahterakan masyarakat yang ada di lingkungan wilayahnya tersebut. Pengembangan kawasan konservasi secara berkelanjutan melalui ekowisata menjadi salah satu alternatif untuk mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat desa penyangga dan kepentingan pelestarian keanekaragaman hayati TNBNW.

Oleh karena itu jasa ekowisata di kawasan TNBNW desa Tulabolo dikemas secara menarik, seperti kegiatan menjelajahi hutan TNBNW seperti *bird watching* satwa endemik Sulawesi, seperti tarsius, burung maleo, babi rusa, anoa serta berbagai fauna lainnya, gua kapur stalaktit, sumber mata air panas, serta dimana yang menjadi ikonik wisata ini adalah burung maleo yang merupakan satwa endemik Sulawesi melalui kegiatan *foster parent* maleo sebagai bentuk upaya konservasi terhadap satwa endemik yang hampir punah tersebut kepada wisatawan. Pengembangan ekowisata dengan memanfaatkan keberadaan potensi obyek wisata alam yang berada di Desa Tulabolo yang masuk dalam zona pemanfaatan TNBNW yang berada di Desa tersebut seluas 2.461,63 hektar<sup>11</sup>. Sejak tahun 2018 ada 87 wisatawan mancanegara serta sebanyak 235 wisatawan lokal dan tahun 2019 periode Januari-Juli ada 53 wisatawan mancanegara serta

---

<sup>10</sup> Karsudi, Soekmadi R, Kartodiharjo H. 2010. *Strategi pengembangan ekowisata di Kabupaten Yapen Propinsi Papua*. JMHT. Vol. XVI, (3): 148–154, Desember 2010

<sup>11</sup> [Epassbis.org](http://epassbis.org). *Masyarakat Sekitar Kawasan*. diakses melalui <http://epassbis.org/indeks/php/masyarakat-sekitar-kawasan> pada tanggal 02 Juni 2019 pukul 13.04

sebanyak 161 wisatawan lokal yang datang ke TNBNW di Desa Tulabolo.<sup>12</sup> Kunjungan wisatawan tersebut telah berkontribusi terhadap masyarakat desa melalui penyediaan akomodasi ekowisata seperti homestay, ojek dan juga pemandu wisata.

Kerjasama Pemerintah Balai TNBNW dan Kelompok Ekowisata Maleo dalam pengembangan ekowisata ini difasilitasi dan didanai mitra TNBNW yaitu *Enhancing Protected Area System in Sulawesi (EPASS)* sebagai *Non Government Organization*, melalui program *micro capital grant* atau bantuan dana skala kecil yang dialokasikan untuk membantu masyarakat disekitar kawasan TNBNW, sekaligus sebagai penguatan penyangga kawasan TNBNW.<sup>13</sup> Hal ini sebagai upaya menyelaraskan pelestarian alam dan kepentingan masyarakat sekitar dalam mendorong pembangunan sosial ekonomi.

Keberadaan kawasan konservasi seperti taman nasional disekitar desa penyangga yang dimanfaatkan secara optimal dapat berpengaruh signifikan bagi pengembangan ekowisata serta memberikan manfaat ekonomi masyarakat dan juga konservasi, dimana konsep dan implementasi ekowisata tidak dapat dilepaskan dari pengembangan kawasan konservasi, sebagai suatu pendekatan ekonomi yang menelaah dan mengkaji manfaat sumber daya alam dan lingkungan dalam kaidah-kaidah konservasi.<sup>14</sup> Pengembangan ekowisata yang melibatkan masyarakat secara konsisten akan dapat memberikan manfaat atau dampak

---

<sup>12</sup> Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone

<sup>13</sup> Dokumen Petunjuk Teknis Program Bantuan Skala Kecil EPASS Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2017

<sup>14</sup> Iwan Nugroho, Purnawan D. Negara. 2014. *Pengembangan Desa Melalui Ekowisata*. Solo: PT Era Adicitra Intermedia

ekonomi bagi masyarakat dan manfaat bagi konservasi/kelestarian.<sup>15</sup> Kerjasama antara Kelompok Masyarakat, Proyek EPASS dan Balai TNBNW dalam pengembangan ekowisata dilakukan sebagai bentuk alternatif pendapatan ekonomi masyarakat agar tidak bergantung pada TNBNW sekaligus sebagai upaya dalam perlindungan dan pengelolaan Taman Nasional berkelanjutan dengan tetap memperhatikan nilai ekonomi dan ekologi. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka point penting dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana **kemitraan balai taman nasional, epass, dan kelompok ekowisata maleo dalam pengembangan ekowisata di kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, Desa Tulabolo Kabupaten Bone Bolango.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kemitraan balai taman nasional, epass, dan kelompok ekowisata maleo dalam pengembangan ekowisata di kawasan taman nasional bogani nani wartabone, Desa Tulabolo Kabupaten Bone Bolango ?
2. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam kemitraan balai taman nasional, epass, dan kelompok ekowisata maleo dalam pengembangan ekowisata di kawasan taman nasional bogani nani wartabone, Desa Tulabolo Kabupaten Bone Bolango ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kemitraan balai taman nasional, epass, dan kelompok ekowisata maleo dalam pengembangan ekowisata di kawasan taman nasional bogani nani wartabone, Desa Tulabolo Kabupaten Bone Bolango

---

<sup>15</sup>Husamaha, Atok Miftachul Hudhab. *Evaluasi Implementasi Prinsip Ekowisata Berbasis Masyarakat dalam Pengelolaan Clungup Mangrove Conservation Sumbermanjing Wetan, Malang*. Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Vol. 8 No. 1 April 2018: 86-95



2. Untuk mengetahui apa saja permasalahan yang dihadapi dalam kemitraan Balai Taman Nasional, epass, dan kelompok ekowisata maleo dalam pengembangan ekowisata di kawasan taman nasional bogani nani wartabone, Desa Tulabolo Kabupaten Bone Bolango.

#### **1.4 Manfaat**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa individu dan lembaga terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis

##### **1. Manfaat Teoritis**

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu dan referensi kepada pembaca atau penelitian selanjutnya, khususnya berkaitan dengan kemitraan dalam pengembangan ekowisata di kawasan penyangga taman nasional antara pemerintah dan kelompok masyarakat, serta penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan informasi bagi penelitian selanjutnya serta memperluas kajian ilmu pengetahuan tentang Pengembangan dan Pembangunan dalam sektor Pariwisata dalam mata kuliah Pembangunan dan Pengembangan Masyarakat..

##### **2. Manfaat Praktis**

Untuk memberikan masukan kepada lembaga pemerintah khususnya Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dalam melakukan, khususnya kemitraan melalui pengembangan ekowisata di kawasan penyangga TNBNW. Selanjutnya untuk kelompok masyarakat agar nantinya penelitian ini dapat

menjadi wawasan dan informasi bagi masyarakat bagaimana meningkatkan kesadaran dan pengetahuan serta partisipasi dalam upaya menjaga hutan serta mampu meningkatkan ekonomi tanpa harus merusak alam.

### 1.5 Definisi Konseptual

#### 1. Konsep Kemitraan

Kemitraan Menurut Ambar Teguh Sulistyani dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership* dan berakar dari kata *partner*. Partner dapat diterjemahkan sebagai pasangan, jodoh, sekutu, kompanyon, sedangkan *partnership* diterjemahkan sebagai persekutuan atau perkongsian. Berdasarkan terjemahan dari asal katanya, kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan. Kerjasama tersebut terjalin dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.

Dalam konsep kemitraan menurut Sulistyani terdapat model-model yang mampu menggambarkan hubungan antarorganisasi yaitu pertama *Pseudo partnership*, atau kemitraan semu, Kedua *Mutualism partnership*, atau kemitraan mutualistik, Ketiga *Conjugation partnership*, atau kemitraan melalui peleburan dan pengembangan. Dalam melakukan kemitraan, terdapat prinsip-prinsip yang harus dipahami oleh anggota kemitraan. Prinsip-prinsip kemitraan perlu dipahami karena prinsip ini yang melandasi terjalinnya suatu pola kemitraan yang baik yakni kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan.

## 2. Ekowisata

Ekowisata menurut *The International Ecotourism Society* menjelaskan bahwa ekowisata sebagai perjalanan wisata alam yang bertanggung jawab dengan cara mengkonservasi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal<sup>16</sup>. Ekowisata dihargai dan dikembangkan sebagai salah satu program usaha yang sekaligus bisa menjadi strategi konservasi dan dapat membuka alternatif ekonomi bagi masyarakat. Dengan pola ekowisata, masyarakat dapat memanfaatkan keindahan alam yang masih utuh, budaya, dan sejarah setempat tanpa merusak atau menjual isinya. Ekowisata di kawasan TNBNW memberi nilai konservasi terhadap tumbuhan dan satwa terutama satwa endemik Sulawesi yang hampir punah yaitu burung Maleo, sedangkan nilai ekonomi dengan melibatkan masyarakat lokal desa penyangga TNBNW dalam mengelola ekowisata yaitu pengelolaan *homestay*, *tour guide*, transportasi.

## 3. Taman Nasional

Kawasan Konservasi merupakan kawasan yang ditetapkan oleh pemerintah guna melindungi keanekaragaman hayati satwa maupun tumbuhan beserta ekosistemnya. Salah satu kawasan konservasi yakni taman nasional. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan,

---

<sup>16</sup>*The International Ecotourism Society*. 2015. Dalam Melvi Reimon Mangngi Tiga, Thesis: “Pengembangan Ekowisata Sebagai Alternatif Upaya Konservasi Taman Nasional Matalawa Di Kabupaten Sumba Timur, NTT”, Bogor: Universitas Pertanian Bogor. 2018

pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi<sup>17</sup>. Pengelolaan kawasan konservasi pada Taman Nasional Bogani Nani Wartabone saat ini dikelola oleh Balai TNBNW yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dengan tugas utama penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan konservasi, pemanfaatan jasa lingkungan dan pengelolaan flora dan fauna secara *in-situ* berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan luas 282.008,757 hektar.

### 1.6 Definisi Operasional

1. Kemitraan dalam pengembangan ekowisata di kawasan penyangga Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, di Desa Tulabolo
  - a. Tujuan melakukan kemitraan
  - b. Peran para aktor yang terlibat dalam pengembangan ekowisata
  - c. Membangun kesetaraan antar pihak yang bermitra
    1. Menyusun isi perjanjian kerjasama
    2. Menyusun RPP dan RKT
  - d. Bentuk kegiatan kemitraan antara balai taman nasional, epass, dan kelompok ekowisata maleo
    1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kelompok
    2. Pemanfaatan bantuan dana hibah skala kecil
    3. Promosi ekowisata secara bersama
  - e. Hasil kemitraan atau *mutual benefit*

---

<sup>17</sup>Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

2. Permasalahan yang dihadapi dalam kemitraan balai taman nasional, epass, dan kelompok ekowisata maleo dalam pengembangan ekowisata di kawasan taman nasional bogani nani wartabone, Desa Tulabolo Kabupaten Bone Bolango

### **1.7 Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana metode ini bertujuan untuk memahami suatu kejadian atau fenomena sesuai dengan kondisi yang berada di lapangan. Dalam upaya menjawab rumusan masalah penelitian, maka peneliti menggunakan serangkaian metode penelitian sebagai berikut :

#### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian diskriptif yang mana hasil dari penelitian ini nantinya akan menghasilkan data-data deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan kemitraan balai taman nasional, epass, dan kelompok ekowisata maleo dalam pengembangan ekowisata di kawasan taman nasional bogani nani wartabone, Desa Tulabolo Kabupaten Bone Bolango.

#### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer, merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung melalui observasi seperti data dari Rencana Pengelola Taman Nasional (RPTN) TNBNW, dokumen perjanjian kerjasama antara Balai TNBNW dengan Kelompok Ekowisata Maleo, Rencana Pelaksanaan Program (RPP) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT), data bantuan proyek EPASS, serta data terkait dengan penelitian

Sementara itu data sekunder dalam penelitian ini diperoleh atau dikumpulkan dari buku, jurnal, media massa, penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan dan atau informasi lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti akan melakukan beberapa cara untuk memperoleh data yang diperlukan yakni dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Pertama, observasi yang akan peneliti lakukan yakni observasi lapangan, dimana peneliti turun lapang ke tempat penelitian untuk mengamati dan memahami hal-hal yang ada di dapat dari subjek penelitian mengenai kemitraan balai taman nasional, epass, dan kelompok ekowisata maleo dalam pengembangan ekowisata di kawasan taman nasional bogani nani wartabone, Desa Tulabolo Kabupaten Bone Bolango.

Kedua wawancara. Wawancara dilakukan untuk menggali semua informasi kepada subjek penelitian yang terkait kemitraan balai taman nasional, epass, dan kelompok ekowisata maleo dalam pengembangan ekowisata di kawasan taman nasional bogani nani wartabone, Desa Tulabolo Kabupaten Bone Bolango. Dalam teknik ini peneliti melakukan wawancara secara langsung, dan tidak menutup kemungkinan menggunakan wawancara tidak langsung dengan subjek penelitian. Adapun wawancara pada penelitian ini pada pelaksanaanya menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis berdasarkan defisini operasional penelitian.

Ketiga dokumentasi. Dalam teknik ini dokumentasi berupa informasi yang berasal dari catatan baik dari Balai TNBNW, EPASS serta dari Kelompok

Ekowisata Maleo, maupun masyarakat yang ada di Desa tersebut baik dokumentasi berupa tulisan, gambar, surat-surat dan salinan peraturan perundang-undangan. dokumentasi menjadi sebuah fakta atau kebenaran yang terjadi di lapangan.

#### 4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian digunakan untuk mendapatkan sejumlah informasi tentang suatu unit permasalahan dan pengumpulan data<sup>18</sup>. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *purposive sampling*, adapun *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu yakni dianggap paling mengetahui permasalahan yang akan diteliti<sup>19</sup>. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini yakni Kepala Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional I Suwawa, Koordinator Lapangan E-PASS TNBNW, Kepala Desa Tulabolo, Ketua Kelompok Ekowisata Maleo.

#### 5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat berlangsungnya penelitian, dimana peneliti akan memperoleh data sehingga data yang didapatkan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun penelitian ini berlokasi di Desa Tulabolo Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, serta Kantor Seksi Pengelola TNBNW I Limboto Jl A.K. Luneto, Gorontalo.

#### 6. Teknik Analisa Data

Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Analysis Interactive*.

---

<sup>18</sup> Bagong, Suyanto. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group.

<sup>19</sup>Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Cetakan ke-22, hal. 217

Model dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclutions*).<sup>20</sup>

### 1. Pengumpulan Data

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen yang telah didapat berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan fokus penelitian yaitu terkait proses kemitraan balai taman nasional, epass, dan kelompok ekowisata maleo dalam pengembangan ekowisata di kawasan taman nasional bogani nani wartabone, Desa Tulabolo Kabupaten Bone Bolango

### 2. Reduksi Data

Reduksi data dalam penelitian ini merupakan kegiatan merangkum dan meringkas data-data yang sudah di dapatkan mengenai proses kemitraan balai taman nasional, epass, dan kelompok ekowisata maleo dalam pengembangan ekowisata di kawasan taman nasional bogani nani wartabone, Desa Tulabolo Kabupaten Bone Bolango.

### 3. Penyajian Data

Adapun data-data yang dipaparkan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses kemitraan balai taman nasional, epass, dan kelompok ekowisata maleo dalam pengembangan ekowisata di kawasan taman nasional bogani nani wartabone, Desa Tulabolo

---

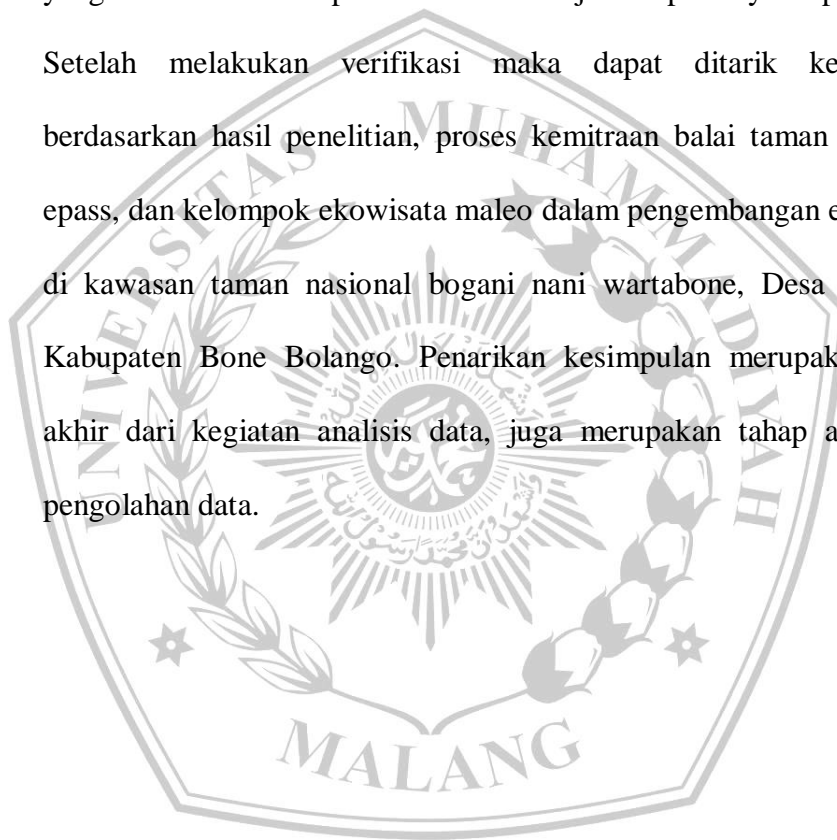
<sup>20</sup>Mathew B Miles dan Michael Huberman. 1992. *Analisa Data Kualitatif*Buku Sumber Tentang *Metode-metode Baru*. Bandung:Alfabeta

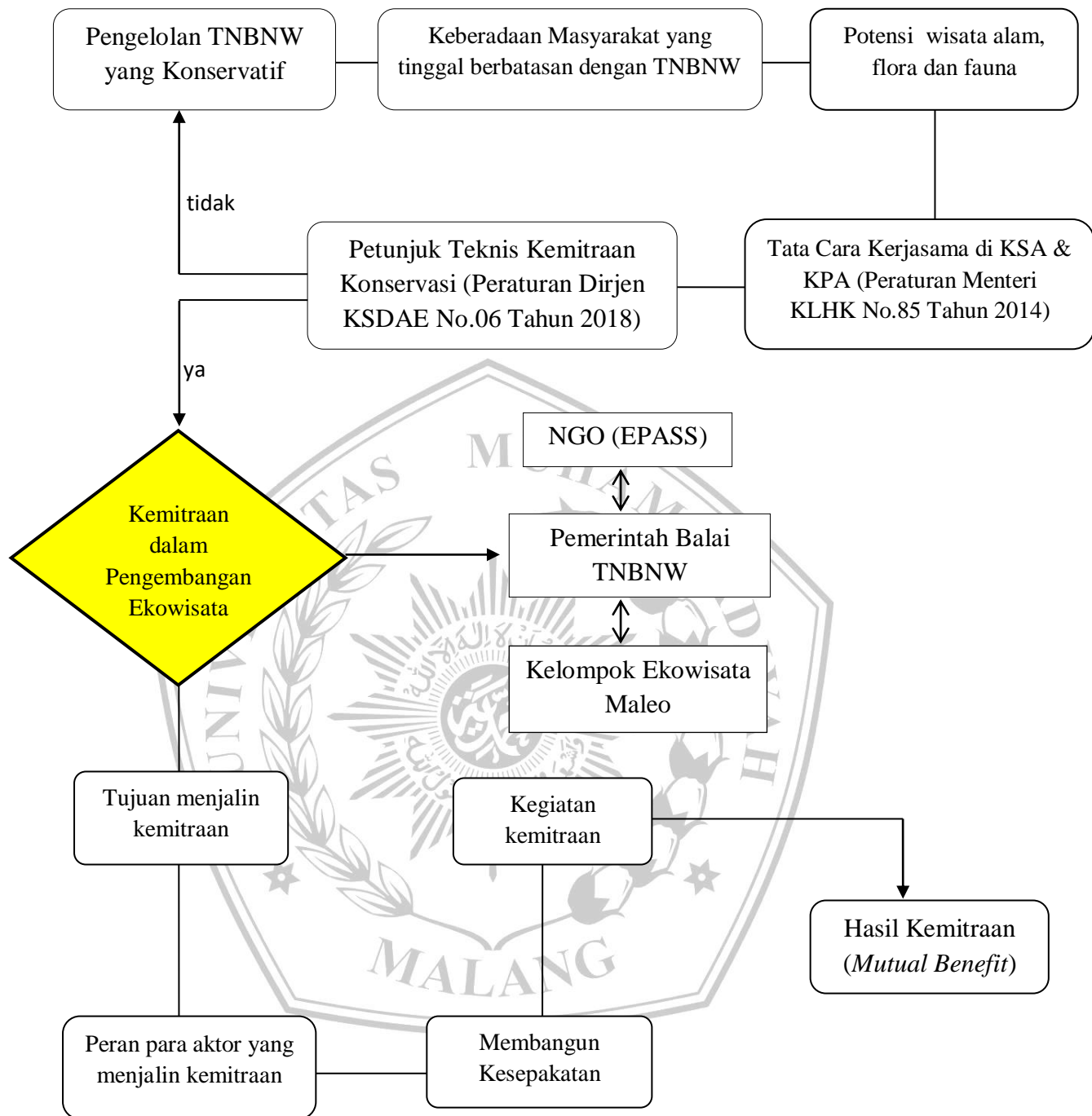


Kabupaten Bone Bolango serta permasalahan yang dihadapi dalam proses kemitraan dalam pengembangan ekowisata.

#### 4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan data adalah tahap terakhir dalam rangkaian analisis data kualitatif dalam model interaktif. Kesimpulan data adalah proses verifikasi dari data-data yang telah dipilah pada tahap sebelumnya yang kemudian disimpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian, proses kemitraan Balai Taman Nasional, Epass, dan kelompok ekowisata Maleo dalam pengembangan ekowisata di kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, Desa Tulabolo Kabupaten Bone Bolango. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data, juga merupakan tahap akhir dari pengolahan data.





Pengelolaan kawasan taman nasional yang belum melibatkan masyarakat di dalam maupun sekitar kawasan sering menimbulkan perbedaan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat. pengelolaan kawasan konservasi yang masih

mengedepankan pola konservatif, yang memandang kawasan konservasi menjadi sebuah keharusan sehingga pengelolaan kawasan hutan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW) masih sebatas mengamankan dari pada memanfaatkan potensi yang ada. Padahal pada kawasan hutan TNBNW bahwasannya keberadaannya lekat dengan masyarakat lokal atau adat yang secara turun-temurun telah ada jauh sebelum kawasan dibentuk. Saat ini terdapat 125 desa penyangga atau desa yang tinggal berbatasan langsung dengan kawasan TNBNW.

Masyarakat adalah pelaku utama yang dapat menjadi sumberdaya potensial sekaligus ancaman terhadap kelestarian kawasan. Pada saat kawasan konservasi dianggap sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi masyarakat sekitar, maka masyarakat menjadi pendukung dalam upaya pelestarian kawasan konservasi tersebut. Sebaliknya apabila kawasan dianggap sebagai penghalang dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, maka masyarakat sekitar akan menjadi ancaman. Oleh sebab itu keberadaan masyarakat ini perlu dipandang sebagai mitra strategis dalam berbagai pengelolaan kawasan dengan pola pemanfaatan yang bertanggung jawab salah satunya yakni dengan memanfaatkan keberadaan potensi objek wisata alam, flora dan fauna yang dikemas menjadi ikonik wisata di kawasan sehingga menjadi salah satu destinasi wisata alam di kawasan konservasi di Indonesia.

Maka dari itu, pengelolaan kawasan TNBNW tidak dapat dijalankan sendiri, perlu keterlibatan pihak lain diluar pemerintah. Salah satunya masyarakat lokal. Hal ini sebagaimana diamanatkan oleh Kepala Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang 10 Cara Baru Tata Kelola

Kawasan Konservasi yang dimana point pertamanya yakni menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek dalam berbagai pengelolaan kawasan konservasi. Hal ini didukung oleh Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam beserta perubahannya.<sup>21</sup> Aturan ini diperkuat lagi dengan adanya Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Oleh sebab itu pemerintah melalui Balai TNBNW mengajak masyarakat lokal yakni masyarakat desa penyangga salah satunya Desa Tulabolo untuk menjadi mitra dalam pengelolaan kawasan yakni dengan mengembangkan ekowisata. Ekowisata dipilih karena didukung oleh flora dan fauna endemik Sulawesi dan objek wisata alam seperti air terjun, gua kapur, sumber mata air panas, panorama alam. Dalam pengembangan ekowisata ini kelompok masyarakat yang merupakan representatif dari Desa Tulabolo dibantu pendanaannya oleh mitra dari Balai TNBNW yakni EPASS melalui dana hibah skala kecil yang memang diperuntukan kepada kelompok masyarakat yang telah bersepakat melakukan kerjasama dengan Balai TNBNW.

Untuk menganalisis kemitraan dalam pengembangan ekowisata, peneliti menggunakan konsep kemitraan oleh Ambar Teguh Sulistyani dimana kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling

---

<sup>21</sup> Peraturan Menteri LHK Nomor: P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perubahan atas P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

membutuhkan. Kerjasama tersebut terjalin dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Adapun ruang lingkup kemitraan yakni tujuan menjalin kemitraan, yakni dari pihak Balai TNBNW dan kelompok masyarakat yakni Kelompok Ekowisata Maleo, kemudian peran dari masing-masing aktor yang terlibat baik pasif maupun aktif.

Selanjutnya sebagaimana konsep kemitraan yakni terbentuk atas dasar kesepakatan maka pihak yakni Balai TNBNW dan Kelompok Ekowisata Maleo membentuk kesepakatan bersama sebagai wujud dari komitmen para pihak yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini juga mengimplementasikan prinsip *equality* atau kesetaraan antar para pihak yang bermitra. Lebih lanjut pemanfaatan pendanaan dari EPASS secara transparan, ini juga merupakan salah satu prinsip umum dalam kemitraan. Selain itu dari kemitraan ini akan melahirkan berbagai bentuk kegiatan antara lain peningkatan kapasitas serta promosi ekowisata bersama. Sehingga kemitraan yang terjalin tersebut dapat mencapai tujuan yang diharapkan serta memberikan manfaat atau *mutual benefit* yakni kepentingan konservasi dan ekonomi kepada para pihak yakni Balai TNBNW, EPASS, serta Kelompok Ekowisata Maleo.